SETIAWATI DARMOJUWONO

Manipulasi Bahasa dan Prasangka Sosial dalam Komunikasi*

Memasuki abad ke-21 peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari semakin besar, informasi-informasi yang disampaikan melalui berbagai media tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Demikian besar peran bahasa dalam kehidupan kita sehingga manusia sering lupa bahwa kata tidak identik dengan realitas (benda-benda, peristiwa, keadaan) yang dilambangkannya. Kata bukan merupakan label untuk realitas.

Keterkaitan antara bahasa dan realitas dari segi pandang linguistik dapat dijelaskan melalui hipotesis Sapir-Whorf (Whorf 1984), yang menyatakan bahwa manusia yang berbeda bahasanya melihat realitas juga berbeda, karena bahasa membentuk pemikiran manusia. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa manusia akan lebih mudah mengingat benda-benda, keadaan atau peristiwa yang secara linguistik dilambangkan dengan kata (Rosch 1978, Darmojuwono 1985, Lakoff 1987). Hal ini menunjukkan bahwa bahasa mempengaruhi pemikiran manusia. Demikian besar pengaruh bahasa terhadap pemikiran manusia sehingga melalui bahasa terbentuk realitas "dunia bahasa" (Mauthner 1998: 9). Realitas ini berbeda dengan realitas di luar bahasa, namun kedua hal ini sering dianggap identik.

Perbedaan antara "dunia bahasa" dengan "dunia realitas" (realitas di luar bahasa) tidak selalu disadari oleh penutur-penutur bahasa. Keadaan ini sering dimanfaatkan sebagai salah satu strategi komunikasi dalam bentuk manipulasi bahasa. Menurut Lewandowski (1985: 853) manipulasi bahasa merupakan tindakan untuk mempengaruhi atau mengarahkan

* Tulisan ini merupakan perbaikan dari makalah yang disampaikan dalam Simposium Visi Revormasi Berwawasan Budaya Menuju Abad Ke-21, diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia; Depok, 1–3 Desember 1998.

perilaku, sikap dan pendapat orang lain dengan menggunakan bahasa. Manipulasi bahasa bertujuan untuk menutupi realitas yang ada, dan mempengaruhi seseorang agar memiliki pandangan atau berperilaku sesuai dengan yang diinginkan terhadap orang atau benda-benda tertentu demi kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Manipulasi bahasa dalam kehidupan sehari-hari antara lain dapat dijumpai dalam ragam bahasa iklan, ragam bahasa politik, ragam bahasa jurnalistik, bahkan dalam bahasa sehari-hari seperti yang digunakan dalam transaksi perdagangan.

MANIPULASI BAHASA DAN PRASANGKA SOSIAL DALAM RAGAM BAHASA POLITIK

Manipulasi bahasa dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain :

- menggunakan kata-kata yang mengandung unsur makna emotif sehingga dapat menimbulkan emosi positif atau negatif.
- menggunakan kata-kata yang rancu maknanya/tidak jelas sehingga memungkinkan perluasan/penyempitan konsep sesuai dengan tujuan.
- mengaburkan konsep kata melalui eufemisme.
- menggunakan metafora sebagai cara pengungkap realitas secara tidak langsung.

Dalam tulisan ini pembahasan difokuskan pada penggunaan kata yang mengandung unsur makna yang emotif dan kata-kata yang rancu maknanya, atau tidak jelas, sehingga memungkinkan perluasan atau penyempitan konsep sesuai dengan tujuan. Pembahasan dititikberatkan pada kedua hal tersebut, karena konflik sosial yang muncul akhir-akhir ini penyebabnya antara lain manipulasi bahasa yang bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia, terutama dengan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur makna emotif, seperti "pribumi-nonpribumi", "muslim-nonmuslim" dan lain-lain.

Contoh yang disajikan dalam tulisan ini berasal dari perdebatan dalam rapat Komisi D MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat):

Dalam rapat lanjutan Komisi D MPR, Kamis pagi perdebatan soal perlu tidaknya kata pribumi dimasukkan dalam pasal 4 Rancangan Ketetapan MPR, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi masih sengit diperdebatkan. [...] yang tegas-tegas menolak pencantuman kata pribumi F-KP* dan Fraksi ABRI. Kedua fraksi ini menolak usulan F-PP* karena bisa menimbulkan

* Selain kutipan langsung, penulisan F-KP dan F-PP dalam tulisan ini diubah menjadi FKP dan FPP; demikian juga Fraksi ABRI disingkat FABRI. (Red)

diskriminasi, SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), dan disintegrasi bangsa.

[...] F-PP melalui juru bicaranya Sofwan Sahlan, menegaskan tentang perlunya kata pribumi dimasukkan dalam Rantap MPR. Usulan tersebut dipertegas dalam penjelasan tambahan yang disampaikan juru bicara F-PP Muchtar Aziz [...]. Menurut Muchtar, kata pribumi menggambarkan identitas bangsa [...], lebih lanjut Muchtar menjelaskan bahwa penduduk nonpribumi tidak hanya golongan etnis Tionghoa, tetapi juga keturunan India, Arab atau bangsa lainnya. "Di bumi Indonesia, mereka itu adalah tamu yang juga harus dihormati tuan rumah (pribumi)," katanya.

Namun, akibat politik *divide et impera*, kaum pribumi kalah dan hidup di bawah cengkeraman penjajah dengan penderitaan lahir batin. Kaum pendatang terutama dari Timur Jauh, diberikan kemudahan dan diperlakukan sebagai warga keturunan dengan hak-hak istimewa. "Itulah pangkal perbedaan yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia penduduk pribumi dipandang sebagai makhluk yang dapat hidup dengan penghasilan satu benggol. Pantaskah di zaman Indonesia merdeka, mereka tidak boleh lagi disebut-sebut karena itu dianggap rasialis dan tidak berwawasan kebangsaan," kata Sofwan Sahlan (*Kompas*, 13 November 1998).

Anggapan bahwa bahasa identik dengan realitas dapat menimbulkan benturan-benturan sosial-budaya dalam masyarakat karena bahasa dan realitas bukanlah dua hal yang sama walaupun antara keduanya ada ketumpangtindihan. Antara konsep kata dan realitas terdapat perbedaan sebab ada bagian realitas yang tidak dicakup oleh konsep, dan selain itu konsep kata mengandung unsur-unsur nonbahasa yang bersifat subyektif (misalnya pandangan seseorang terhadap orang lain atau sekelompok orang). Hal ini menyebabkan makna suatu kata tidak selalu dipahami sama oleh semua orang, dan batas makna kata tidak jelas tetapi kabur. Batas makna yang kabur merupakan salah satu ciri kosakata bahasa sehari-hari, berbeda dengan istilah ilmu pengetahuan yang memiliki definisi yang jelas.

Perbedaan pemahaman makna kata mempengaruhi pemahaman penutur dengan mitra bicaranya dalam suatu komunikasi. Walaupun konteks suatu percakapan berfungsi sebagai alat penyaring untuk ketepatan makna, namun tanpa disadari seorang pembicara dan mitra bicaranya biasanya memahami makna suatu kata seperti yang telah dikenalnya. Dalam komunikasi kesepakatan tentang makna kata yang digunakan hanya bersifat semu, karena itu disebut kesepakatan semu (Hannappel dan Melenk 1979).

Perbedaan pemahaman konsep suatu kata yang melambangkan realitas yang sama dapat menjadi gangguan suatu komunikasi. Sebagai contoh perbedaan konsep kata "pribumi" dalam kutipan tersebut

menyebabkan pemahaman yang berbeda antara pembicara dan mitra bicaranya. Kata "pribumi" memiliki makna leksikal penduduk asli, dalam Rantap (Rencana Ketetapan) Demokrasi Ekonomi makna kata "pribumi" dipahami berbeda antara FKP dan FABRI dengan FPP.

Perbedaan konsep makna dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Bagi FPP makna kata "pribumi" memiliki unsur-unsur emotif sebagai berikut: identitas bangsa, golongan etnis yang bukan keturunan Tionghoa, Arab, India dan lain-lain, tuan rumah bagi orang-orang keturunan, pada masa penjajahan dan Orde Baru tidak memiliki hak istimewa, pada masa penjajahan hidup dengan satu benggol. Sedangkan unsur-unsur emotif yang dikandung makna kata "pribumi" untuk FKP dan FABRI bersifat eksklusif, restriktif, diskriminatif dan berdampak negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, karena itu FKP dan FABRI tidak setuju menambahkan kata "pribumi" yang memiliki unsur-unsur makna emotif yang negatif.

Berbeda dengan FKP dan FABRI , FPP berpendapat bahwa unsur-unsur emotif yang ada dalam kata "pribumi" bersifat positif karena menekankan identitas bangsa dan rakyat kecil. Jika kata "pribumi" ditambahkan dalam Rantap MPR tentang politik ekonomi, maka unsur-unsur emotif yang dianggap positif oleh kelompok FPP kemungkinan besar akan dipahami berbeda bukan hanya oleh FKP dan FABRI tetapi

juga bagi kelompok etnis nonpribumi, kecuali jika diberikan konsep yang jelas siapa yang dimaksudkan dengan pribumi dan disebutkan unsur-unsur emotif yang positif seperti dalam pemahaman kata "pribumi" oleh FPP.

Perbedaan pemahaman kata "pribumi" dalam kelompok etnis non-pribumi disebabkan karena kata "pribumi" memiliki unsur-unsur emotif (stereotip) yang bersifat negatif bagi masyarakat nonpribumi. Susetyo (1998) mengutip Dahana yang mengatakan bahwa stereotip kata "pribumi" bagi golongan nonpribumi adalah pemalas, hidupnya cuma mencari keuntungan, mau cari untung tanpa keluar keringat, bodoh, pemeras. Dari contoh ini terlihat jelas bahwa perbedaan pemahaman unsur emotif kata "pribumi" dalam berbagai golongan politik dan etnik dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari segi pandang linguistik untuk menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi sebaiknya dihindarkan penggunaan kata yang mengandung stereotip dalam perumusan suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat yang multietnik. Hal ini untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda, karena unsur emotif makna yang negatif dapat menjadi pemicu konflik-konflik sosial. Terutama unsur emotif makna kata yang berkaitan dengan etnik dan agama.

Dilihat dari aspek linguistik stereotip merupakan ungkapan verbal yang ditujukan pada satu kelompok sosial atau perorangan sebagai anggota kelompok sosial tertentu, ungkapan verbal ini berisi penyamarataan sifat-sifat tertentu bagi sekelompok manusia (Quasthoff 1973). Penelitian stereotip di bidang linguistik tidak hanya dibatasi pada kata tetapi juga mencakup kalimat dan bahkan wacana, sedangkan di bidang sosiologi dan psikologi lebih memusatkan pada kata. Gejala stereotip terutama menjadi bidang kajian disiplin ilmu sosiologi dan psikologi, namun pembahasan stereotip akan menjadi lengkap jika aspek linguistik juga diperhatikan karena stereotip dinyatakan melalui bahasa.

Berdasarkan kriteria luas jangkauan penyebaran stereotip, dan keterikatan stereotip dengan konteks komunikasi dapat dibedakan empat jenis stereotip yaitu stereotip individual, stereotip sosial, stereotip tetap dan stereotip tidak tetap. Stereotip individual adalah stereotip suatu kata yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimilikinya; sedangkan stereotip sosial adalah stereotip yang ada dalam pemikiran sekelompok manusia. Stereotip suatu kata yang tidak terikat dengan konteks tertentu disebut stereotip tetap, sedangkan

stereotip yang muncul karena dikaitkan dengan konteks tertentu disebut stereotip tidak tetap.

Stereotip kata “pribumi” dalam Rantap Demokrasi Ekonomi bersifat sosial dan tidak tetap, karena stereotip ini muncul berkaitan dengan konteks tertentu, yaitu Rantap Demokrasi Ekonomi dan merupakan stereotip sosial karena merupakan pemikiran kelompok. Sedangkan stereotip kata “pribumi” bagi kelompok nonpribumi bersifat sosial dan tetap karena stereotip ini ada dalam benak sekelompok orang dan tidak terikat dengan konteks tertentu.

MANIPULASI BAHASA DAN PRASANGKA SOSIAL DALAM RAGAM BAHASA SEHARI-HARI

Istilah ragam bahasa sehari-hari berarti ragam bahasa yang tidak terikat dengan komunikasi dalam suatu disiplin ilmu tertentu, dan tidak digunakan dalam komunikasi antarmanusia yang memiliki keahlian khusus. Ragam bahasa sehari-hari mengacu pada ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi antarmanusia tanpa terikat pada suatu disiplin ilmu atau keahlian tertentu, misalnya antara pembaca dan redaksi suatu media cetak, seperti contoh di bawah ini :

Setelah membaca Opini *Tempo* [...], saya sedikit kecewa menemukan kata Cina dalam Opini tersebut. Saya mengharuskan agar redaksi *Tempo* tidak lagi menggunakan kata Cina dalam penyajian beritanya, akan lebih baik jika diperhalus menjadi Tionghoa. Karena penggunaan kata Cina sangat menyakitkan dan dapat dianggap menghina minoritas WNI keturunan Tionghoa. Maaf, jika saya menggunakan kata mengharuskan, tidak lain adalah bentuk kecintaan saya kepada majalah *Tempo*, agar dapat menjadi majalah kesayangan milik seluruh masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan (*Tempo*, 26 Oktober 1998).

Kutipan surat pembaca tersebut berasal dari sebuah majalah yang terbit di ibu kota. Penulis surat beranggapan bahwa penggunaan kata “cina” dalam penyajian berita menyakitkan hati dan merupakan penghinaan bagi minoritas WNI keturunan Tionghoa. Reaksi penulis surat pembaca yang sangat emosional kemungkinan disebabkan oleh dua hal, pertama pemahaman kata “cina” terikat dengan stereotip yang bersifat sosial dan tetap seperti kolusi, materialistis, tidak memiliki loyalitas terhadap negara, penyelundup, eksklusif, pemakan babi, dan lain-lain. Kedua, ia tidak membedakan konteks tempat munculnya kata “cina”.

Kata “cina” memiliki makna etimologis yang tidak mengandung unsur makna yang emotif (Dahana 1998, Sutami 1998). Kemunculan unsur emotif kata “cina” kemungkinan besar disebabkan oleh penggantian istilah

"Tiongkok" dan "Tionghoa" menjadi "Cina", yang merupakan keputusan resmi Presidium Kabinet pada tanggal 25 Juli 1967. Bagi kelompok masyarakat Tionghoa, istilah "Tionghoa" dan "Tiongkok" merupakan kata-kata yang mampu mengungkapkan konsep identitas mereka sebagai salah satu kelompok etnik di Indonesia, penggantian istilah dirasakan sebagai penghapusan identitas karena kedua kata tersebut telah merupakan bagian dari jati diri mereka, sedangkan kata "Cina" dianggap sebagai kata yang dipaksakan oleh pemerintah dan mengandung makna yang diskriminatif. Dugaan ini diperkuat dengan hasil pengamatan Arif Budiman yang mengatakan bahwa pandangan itu terdapat terutama pada generasi tua yang masih peka terhadap penggunaan istilah "Cina" (Budiman 1998).

Dalam perkembangan selanjutnya kata cina memiliki stereotip yang sangat negatif, padahal pada konteks tertentu kata cina tidak mengandung stereotip, seperti kata-kata "tahu cina," "petai cina," "Bidara Cina," "pacar cina" (Sutami 1998: 8). Demikian juga dalam kalimat "Di kelas ini ada 2 orang Ambon, 3 orang Batak, 5 orang Aceh dan 4 orang Cina," kata "cina" tidak mengandung unsur emotif. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa konteks bahasa tempat munculnya kata "cina" sangat menentukan apakah kata "cina" mengandung unsur makna emotif yang negatif atau tidak.

Stereotip kata "cina" yang negatif dan bersifat sosial sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat untuk memicu kerusuhan rasial yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa, seperti pada bulan Mei 1998. Instruksi Presiden No 26/1998 yang ditandatangani Presiden B. J. Habibie pada tanggal 16 September 1998 menghapus penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah di setiap tingkatan (*Kompas*, 19 Oktober 1998). Dari segi pandang linguistik instruksi ini merupakan tindakan yang positif karena dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dihindarkan penggunaan kata-kata yang maknanya tidak jelas atau rancu dan mengandung unsur emosional, namun tanpa peraturan dan instruksi tertentu hendaknya kita mampu membedakan antara "dunia bahasa" dan "dunia realitas" sehingga kita tidak terkecoh oleh manipulasi bahasa yang terutama merupakan salah satu ciri ragam bahasa politik dan ragam bahasa jurnalistik yang dalam abad ke 21 tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari.

Manipulasi bahasa yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat yang multietnik selalu memanfaatkan unsur-

unsur emotif makna yang bersifat negatif (stereotip yang negatif). Manipulasi bahasa tidak akan lenyap dalam komunikasi di bidang sosial dan politik, siapa pun atau kelompok manapun yang berkuasa, karena itu kemampuan untuk membedakan "dunia bahasa" dan "dunia realitas" merupakan salah satu ciri kedewasaan berpikir seorang manusia yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat di abad ke-21 karena manipulasi bahasa memanfaatkan realitas "dunia bahasa", sedangkan di luar bahasa masih ada realitas yang tidak dapat dimanipulasi. Kemampuan untuk membedakan kedua hal ini akan dapat terlaksana jika tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal maupun nonformal ditingkatkan.

DAFTAR ACUAN

- Budiman, Arif (1998), "Cina atau Tionghoa?" *DR*, No. 01, 22 Agustus 1998.
- Dahana, A (1998), "Antara Cina dan Tionghoa", *Gatra*, No. 51, 7 November 1998.
- Darmojuwono, Setiawati (1985), "Prototyp und Lexikalisches Feld". Disertasi Universität Hannover.
- Hannappel, H dan H. Melenk (1979), *Alltags-sprache*. München:W. Fink
- Kompas*, 19 Oktober 1998.
- Kompas*, 13 November 1998.
- Lakoff, G. (1987), *Women, Fire and Dangerous Things*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lewandowski, Th. (1985), *Linguistisches Wörterbuch*. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Mauthner (1998), *Gesellschaft der Sprachkritiker*. <http://www.weltkreis.com/mauthner/robb.html>
- Quasthoff, U. (1973), *Soziales Vorurteil und Kommunikation. Eine sprachwissen-schaftliche Analyse des Stereotyps*. Frankfurt am Main:Athenaeum
- Rosch, E. (1978), "Human Categorization", dalam N. Warren (ed.) *Studies in Cross-Cultural Psychology*. Vol 1. London: Academic Press, h. 1 – 49.
- Susetyo, D. P. Budi (1998), "Etnis Cina, Stereotip dan Relasi Antar Etnis." Makalah Simposium Etnis Cina Sebagai Minoritas di Indonesia.
- Sutami, H. (1998), "Tentang Istilah Cina dan Tionghoa," *Kata*, Vol. 1/Oktober 1998.
- Tempo*, 26 Oktober 1998
- Whorf, B. L. (1984), *Sprache – Denken –Wirklichkeit*. Hamburg: Rowohlt.